

BAB II

PANDANGAN UMUM POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONFLIK PALESTINA-ISRAEL

Politik Luar Negeri Amerika Serikat mengalami beberapa kali perubahan, perubahan tersebut sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi baik ditingkat domestik maupun ditingkat global³⁶. Perubahan itu terasa pasca serangan 11 September 2001. Politik luar negeri AS yang awalnya hanya berfokus pada faktor-faktor domestik dan bidang perekonomian lebih mewarnai kebijakan luar negeri AS, ketimbang bidang militer dan keamanan.

Serangan 11 September 2001 lalu berdampak besar bagi politik luar negeri AS. Serangan tersebut merubah perilaku para pembuat kebijakan dan publik Amerika secara keseluruhan. Perbedaan pendapat antara Kongres dan Presiden menjadi kecil dan publik sangat mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah Bush dalam menindak lanjuti masalah teroris. Kemunculan teroris sebagai aktor baru dalam dunia Internasional membuat AS melakukan segala cara untuk memerangi teroris. Pasca serangan tersebut politik luar negeri AS menjadi lebih Agresif, beberapa strategi dan bentuk kebijakan seperti embargo, tekanan organisasi-organisasi internasional sampai invansi langsung ke Negara yang dinilai menjadi tempat persembunyian para pelaku terror menjadi corak politik luar negeri AS.

Seiring perjalanan waktu politik luar negeri AS selalu mengalami perubahan. Faktor eksternal seperti kondisi politik dunia internasional banyak berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri AS. Tidak hanya faktor eksternal saja yang berperan dalam perubahan kebijakan luar negeri AS, tetapi faktor internal juga ikut mempengaruhi seperti kondisi dalam negeri, decision making, partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat umum juga berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS.

A. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri AS

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS tidak hanya diputuskan oleh beberapa orang saja, namun melibatkan beberapa actor-aktor dalam politik luar negeri AS. Kebijakan ini yang nantinya sebagai cerminan politik luar negeri AS. Bagaimana semua aktor satu sama lain saling berhubungan sampai akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan baru terhadap isu luar negeri.

1. Aktor-aktor dalam Politik Luar Negeri AS

Proses penentuan kebijakan luar negeri suatu Negara tentu memiliki aktor-aktor yang menjadi penentu arah kebijakan, terlepas dari aktor mana yang paling dominan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi para aktor yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan AS bertambah. Bertambahnya aktor dalam hubungan internasional dewasa ini, semakin beragamnya kepentingan AS, serta semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam dunia internasional menjadi salah satu faktor beragamnya aktor

Politik Pemerintahan Amerika Serikat menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang menentukan kebijakan luar negeri AS seperti Presiden, Kongres, National Security Council (NSC), Departemen Luar Negeri, Central Intelligent Agency (CIA), Departemen Pertahanan, Office of The U.S. Trade Representative (USTR), Kelompok Kepentingan.

1) Presiden

Presiden AS merupakan kepala Negara, kepala pemerintahan, sekaligus menjadi Panglima tertinggi perang militer AS. Presiden AS menjadi aktor utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS. Presiden AS bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakan hukum yang telah dibuat dan menjaga serta mempertahankan Konstitusi.³⁷

Dalam hal pengambilan keputusan, Presiden dapat menyetujui sebuah kebijakan yang diajukan oleh Kongres untuk disahkan menjadi Undang-Undang, disamping itu Presiden juga bisa memveto tiap kebijakan yang di rancang oleh Kongres agar tidak menjadi sebuah Undang-undang. Veto tersebut tidak akan berlaku apabila dua pertiga anggota DPR dan Senat di Kongres menolak veto Presiden. Disisi lain Presiden boleh melakukan perjanjian dengan Negara lain atas persetujuan dua pertiga dari anggota Senat AS.³⁸

2) Kongres

Kongres merupakan salah satu dari cabang pemerintahan Amerika Serikat, yaitu Legislatif. Kongres terdiri dari dua bagian yaitu *Senate* dan *House of*

Representatives. Senator merupakan badan perwakilan Negara bagian sedangkan anggota *House* merupakan badan perwakilan penduduk Negara bagian.³⁹ Peran Kongres juga sangat signifikan yang telah dijelaskan dalam konstitusi AS dalam pasal I. Dalam Konstitusi AS peran Kongres adalah membuat undang-undang yang dianggap "Perlu dan tepat" untuk kepentingan AS dan dijalankan oleh semua bagian dari pemerintahan.

Seluruh kekuasaan legislatif berada ditangan Kongres, itu berarti bahwa kongres merupakan satu-satunya bagian dari pemerintah yang dapat membuat atau merubah hukum yang ada. Lembaga Eksekutif mengeluarkan peraturan baru dibawah otoritas hukum yang telah diberlakukan oleh Kongres.

Peran Kongres dalam penentuan kebijakan luar negeri AS sangat besar, hal tersebut tidak lain karena tugas utama dari Kongres itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang membuat kebijakan. Secara rinci Kongres terlibat dalam proses perancangan, pembahasan dan pengesahan undang-undang. Bagitupun dalam proses pembuatan atau penentuan kebijakan luar negeri, peran Kongres sebagai badan legislatif sangatlah besar.

3) National Security Council (NSC)

NSC merupakan reaksi terhadap kebutuhan untuk mengkorelasikan kebijakan domestik dan internasional yang semakin terkait. Ada dua tugas pokok dari NSC yaitu : Mengkaji tujuan komitmen dan resiko kebijakan luar negeri AS berdasarkan kekuatan dalam negeri, dan memberi saran dan nasehat kepada Presiden berkaitan dengan kebijakan domestik, luar negeri dan militer dalam

³⁹ Bambang Cipto, *Op Cit*, hal. 115

prespektif keamanan nasional dan koordinasi antar departemental⁴⁰. Besar kecilnya peran NSC dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri tergantung pada kebijakan presiden.

4) Departemen Luar Negeri

Departemen luar negeri juga merupakan salah satu aktor penting dalam politik luar negeri AS. Departemen luar negeri membawahi kedutaan besar AS diseluruh penjuru dunia dan menaungi para diplomat AS yang membela kepentingan AS di kancah Internasional. Kedutaan besar berinteraksi langsung dengan Negara dimana kedutaan itu berada dan mewakili AS secara penuh dalam setiap tindakannya. Selain itu, tugas lain dari kedutaan besar adalah mengumpulkan informasi yang berkaitan Negara tersebut, kumpulan informasi dan laporan-laporan dari kedutaan besar yang tersebar di beberapa Negara merupakan bahan pertimbangan bagi presiden dan kongres dalam menentukan kebijakan luar negeri AS.

5) Central Intelligent Agency (CIA)

CIA merupakan salah satu badan yang dimiliki AS yang bertugas dalam hal intelijen AS⁴¹. Tujuan dari CIA adalah mengumpulkan dan menganalisa aktifitas Negara ataupun aktor-aktor tertentu serta menyampaikan analisa tersebut kepada Presiden atau Dewan Keamanan Nasional. Disinilah tugas CIA untuk mengungkapkan rencana dan kemampuan Negara-negara yang dianggap

⁴⁰ Bambang Cipto, *Opcit.* Hal 204

mengancam keamanan AS untuk dijadikan landasan pembuatan kebijakan luar negeri.

6) Departemen Pertahanan

Departemen Pertahanan (Department of Deffence) merupakan salah satu aktor dalam politik luar negeri AS yang memiliki misi untuk menyediakan pasukan militer yang dibutuhkan untuk mencegah perang dan juga untuk melindungi keamanan AS⁴². Menteri pertahanan banyak memberi masukan dan nasehat-nasehat kepada Presiden khususnya dibidang keamanan dan politik luar negeri. Pada masa perang dunia I dan II hingga perang dingin masalah militer pertahanan keamanan menjadi masalah utama, dalam kasus ini peran Departemen Pertahanan sangat besar dalam menentukan kebijakan luar negeri AS.

7) Office of The U.S. Trade Representative (USTR)

USTR dibentuk pada tahun 1963 oleh presiden Kennedy. Kedekatan para pejabat USTR dengan presiden sehingga banyak member masukan terhadap presiden dalam menentukan politik luar negeri. Peran USTR semakin meningkat pada awal decade 90-an dan pada pasca perang dingin dimana isu perdagangan antar bangsa semakin meningkat.

USTR menjadi wadah bagi pengusaha-pengusaha transnasional AS . Atas nama kepentingan para pelaku bisnis AS, USTR berkoordinasi dengan departemen perdagangan sehingga masukan-masukan dari USTR berpengaruh pada proses penentuan kebijakan luar negeri AS.

⁴² <http://www.defense.gov/about/> diakses tgl 19 Desember 2012

8) Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan badan terorganisir yang memiliki tujuan yang sama dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan publik⁴³. Kelompok kepentingan memiliki peran yang cukup besar dalam penentuan politik luar negeri AS. Kelompok kepentingan memainkan perannya saat kebijakan dibahas dalam Kongres melalui komisi dan subkomisi. Pada fase dengar pendapat kelompok kepentingan melakukan loby yang tentunya berpengaruh terhadap penetapan kebijakan yang akan diambil. Ada beberapa kelompok kepentingan yang sering terlibat dalam proses penetapan kebijakan luar negeri AS diantaranya : *Human Rights Watch, Amnesty International, Rotary International, The Zionist Organization, America-Israel Public Affairs Committee (AIPAC)* , *The Roman Catholic Church, The Crooking Institution* . Semuanya memiliki kepentingan masing-masing dalam pemerintahan Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat sendiri, Kelompok Kepentingan adalah salah satu mekanisme penting dimana warga AS membuat ide-ide mereka, kebutuhan, dan juga pandangan tentang pemerintahan AS. Dewasa ini kelompok kepentingan berperan lebih aktif, seorang lobbying tidak hanya mendukung tetapi memberi sponsor agar terbentuk sebuah caucus para senator atau representative. Tidak hanya itu kelompok kepentingan biasanya menjadi motor penggerak dalam aksi demonstrasi bila kebijakan yang di ambil tidak sesuai dengan kehendak mereka. Cara lain yang digunakan oleh kelompok kepentingan memanfaatkan situasi tersebut dengan membiayai kampanye atau menekan para calon politisi. Salah

satu kelompok kepentingan yang sangat besar pengaruhnya dalam pemilu adalah PACs.

2. Gambaran Umum Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Setiap politik luar negeri suatu Negara tentunya memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kepentingan Negara tersebut. Umumnya politik luar negeri selalu dipengaruhi oleh kepentingan nasional. Setiap kebijakan selalu berdasarkan pada besarnya keuntungan yang diperoleh nantinya. Politik luar negeri AS selalu bersentuhan dengan negara-negara yang sedang berkonflik. Hal ini disebabkan AS merupakan negara Super Power yang memiliki pengaruh kuat dalam hubungan antar negara seperti didalam PBB.

AS selau menunjukkan eksistensinya dalam setiap konflik yang terjadi, baik konflik yang melibatkan AS secara langsung ataupun konflik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan AS. AS menyatakan dirinya sebagai polisi dunia, sehingga AS harus berperan aktif dalam menjaga keamanan di dunia. Beberapa konflik yang terjadi juga ada keterlibatan dari AS, seperti konflik yang terjadi di negara-negara Asia-Pasifik, Eropa, dan juga konflik di Timur Tengah. Kebijakan AS akan membenarkan hal yang sesuai dengan ideologi negaranya dan tidak membenarkan yang kemungkinan besar akan mengancam eksistensi AS sendiri.

AS terlibat dalam konflik-konflik didunia seperti Perang yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. AS dengan tegas membela kedaulatan Korea

program nuklirnya. Bahkan menurut menteri Pertahanan AS Leon Panetta menyatakan bahwa yang dilakukan Korea Utara hanya akan mengancam keamanan dikawasan tersebut. Bahkan AS dan sekutunya (Korea Selatan dan Jepang) memperkuat koordinasi kebijakan trilateral untuk menangkal provokasi Korea Utara.⁴⁴

Selain itu, AS juga terlibat dalam konflik Laut China Selatan yang melibatkan China dan negara-negara Asia yang saling memperebutkan kawasan tersebut. Dalam konflik ini ketegangan sebenarnya terjadi antara kedua negara besar AS dan China, dimana AS berpihak kepada negara-negara yang merupakan sekutuknya seperti Philipina. China menilai AS menunjukkan otot kuat militernya di kawasan Asia. Menurut *Watching America*, sebuah LSM yang memantau sepak terjang politik militer AS, ketegangan di Laut China Selatan merupakan bagian dari strategi pertahanan Whashington. Ketegangan meningkat sejak AS mengatakan akan memperkuat kehadiran militernya di Asia-Pasifik.⁴⁵

Berbicara tentang politik luar negeri AS, tidak akan pernah lepas dari Negara-negara Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah menjadi kawasan utama bagi instrument politik luar negeri AS, seperti untuk menjual senjata-senjata perang AS karena di wilayah inilah konflik sering terjadi.

⁴⁴ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/06/02/m4zs9z-as-jepang-korsel-siap-keroyok-korea-utara> diakses pada 21 Desember 2012

Perjalanan politik luar negeri AS tak luput dari ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Begitu kuat pengaruh AS di Timur Tengah, seperti pada saat *Arab Spring* dimana terjadi Reformasi di negara-negara Timur Tengah yang ditandai dengan tumbangannya para pemimpin yang dikenal ditaktor dan anti Demokrasi. Dari Revolusi Tunisia, Mesir, dan juga Libya peran AS sangat kuat. AS mendukung penuh pemimpin negara-negara tersebut dengan nama Demokrasi. Seperti yang dilakukan AS melalui NATO (North Atlantic Treaty Organization) untuk mengancam pemerintahan Muamar Khadafi untuk mundur.

Tidak hanya Reformasi Arab, keterlibatan AS bisa dilihat dari adanya pangkalan militer AS untuk operasi pasukan komando yang dikirim ke kawasan Timur Tengah. Pangkalan terapung ini akan ditempatkan di Teluk Persia yang saat ini sedang tegang setelah Iran mengancam akan menutup selat Hormuz, pintu keluar masuk menuju kawasan perairan yang sibuk dengan pelayaran minyak itu. AS juga memiliki pangkalan Armada kelima US Navy di Bahrain dan menempatkan sedikitnya dua gugus tempur kapal induk di sekitar perairan tersebut.⁴⁶

Dari beberapa keterlibatan AS dalam konflik negara-negara, keterlibatan AS sangat kuat pada konflik Arab-Israel. Dimana AS dengan ideologinya selalu memperjuangkan kepentingan negara sekutunya itu. Termasuk dalam konflik Israel-Palestina, AS yang mengaku memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan menjunjung tinggi nilai Demokrasi mengindahkan semuanya hanya untuk memberikan

⁴⁶<http://internasional.kompas.com/read/2012/01/28/14593813/Pentagon.Siapkan.Pangkalan.Militer.Terapung.untuk.Timur.Tengah> diakses pada 21 December 2012

dukungannya terhadap Israel. Konflik ini merupakan konflik terlama yang sampai sekarang belum menemukan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.

Saat ini tujuan politik luar negeri AS lebih kepada bagaimana menjaga agar kepentingan, pengaruh dan hegemoni tetap terjaga sehingga dapat secara langsung mengintervensi dan mendapat dukungan dari setiap tindakannya.

B. Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Konflik Palestina-Israel

Konflik antara Palestina-Israel merupakan konflik Timur Tengah yang menghasilkan resolusi damai terbanyak dalam PBB. Selain itu, masalah inipun tak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan sikap dari AS sendiri yang lebih banyak memihak sekutunya Israel tanpa melihat perjuangan dan pengorbanan warga Palestina.

1. Sejarah Konflik Palestina-Israel

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan konflik perebutan wilayah. Konflik ini bermula saat Israel dengan politik luar negerinya terus menerus menduduki wilayah Palestina. Pada tahun 1967, melalui perang enam hari, Israel mencaplok seluruh wilayah Palestina dan Jerusalem Timur. Sebagian wilayah secara de Jure memang dikembalikan kepada Otoritas Palestina melalui Perjanjian Oslo tahun 1994, namun secara de facto tentara Israel masih saja berada di daerah tersebut. Bertentangan dengan Konvensi Jenewa, Israel membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah yang didudukinya setelah itu mereka mendatangkan warga Yahudi Israel untuk tinggal disana dan akhirnya wilayah tersebut diklaim sebagai milik Israel. Sampai saat ini Israel terus membangun

kawasan permukiman di berbagai wilayah pendudukan, bahkan di Jerusalem Timur yang merupakan Zona Internasional.⁴⁷

Israel meyakini bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang telah dijanjikan oleh nenek moyang mereka. Setelah mereka mendapatkan penganiayaan berabad-abad diseluruh dunia, Israel akhirnya memproklamirkan kembalinya “tanah rumah” yang sekarang menjadi milik Israel. Hal ini berdasarkan dari kebijakan Inggris yang memfasilitasi imigrasi Yahudi dan pemukiman di Palestina pada tahun 1917-1948. Sehingga pada tahun 1947 Yahudi yang awalnya menguasai 8% dari tanah Palestina menjadi 32%. Disisi lain Israel juga mendapatkan kedaulatannya lebih dulu daripada Palestina. Hal ini dibuktikan dengan diakuinya Israel sebagai Negara oleh PBB pada tahun 1947. Ditahun yang sama PBB menetapkan Resolusi 181 yang membagi dua wilayah Palestina : 56,5% untuk pendirian Negara Yahudi, 43% untuk Negara Arab, dan Jerusalem menjadi wilayah Internasional.

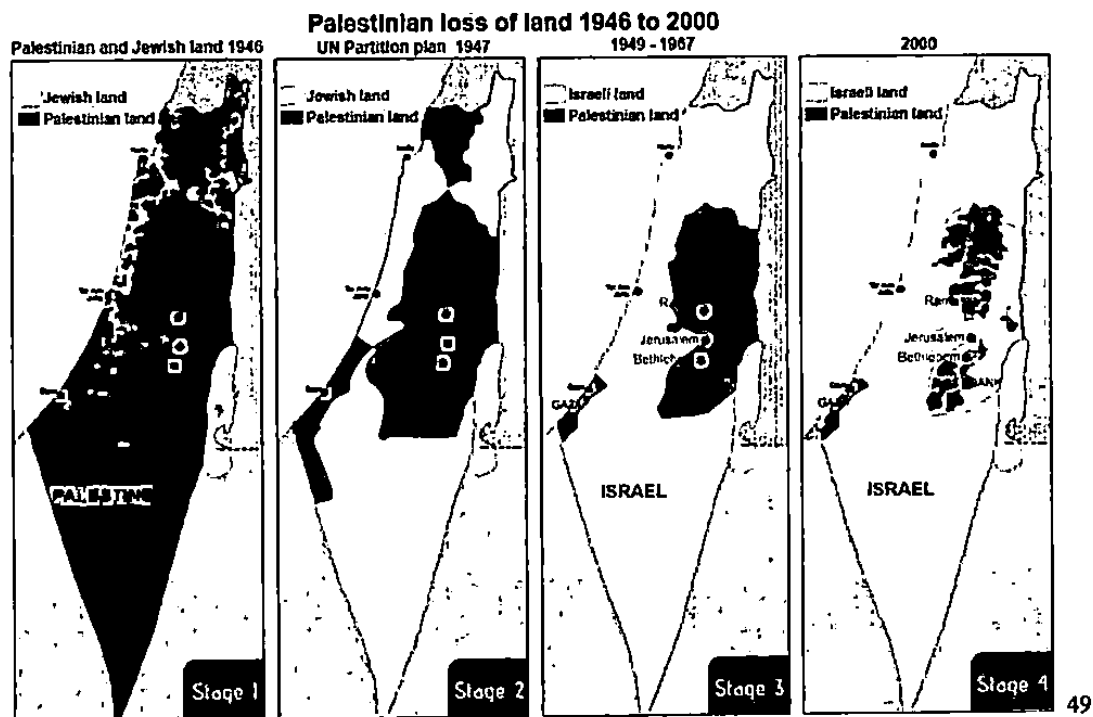
Israel juga menciptakan konflik berkepanjangan yang tak kunjung menemui solusi untuk konflik ini. Pada tahun 1948 Israel kembali melancarkan serangannya, 78% dibawah control Israel. Hasilnya lebih dari 750.000 warga Palestina menjadi pengungsi ditanahnya sendiri dan lebih dari 35.000 warga Palestina menjadi pengungsi di wilayah Israel. Selain itu, Israel juga menghancurkan sekitar 532 desa dan kota di Palestina.⁴⁸ Israel menduduki Sinai,

⁴⁷ http://abimpribumi.blogspot.com/2010/12/analisi-kebijakan-luar-negeri-as_13.html diakses pada 10 November 2012.

Golan Heights dan seluruh Palestina. Kemudian Israel mengumumkan bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota Israel, selain itu Israel juga menguasai dan mengendalikan sumber daya alam di kawasan tersebut.

Gambar 3

Wilayah Palestina dari tahun 1946-2000



Pembangunan Israel atas pemukiman Yahudi semakin menjadi. Kontrol atas sumber daya alam pun dilakukan oleh Israel. Israel juga menyita tanah Palestina di Tepi Barat, Israel juga melakukan pembongkaran lebih dari 18.000 rumah sekitar tahun 1967-2007. Sekitar 25% warga Palestina ditangkap, disiksa bahkan dibunuh. Israel juga melakukan pembersihan etnis, pencabutan hak warga

Negara Palestina, depopulasi masyarakat Palestina, dan mencegah masyarakat Palestina melaksanakan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara.

Untuk memudahkan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina, Israel mendirikan jalan-jalan pintas menuju wilayah Palestina. Selain itu, Israel juga membatasi pembangunan oleh warga Palestina dengan membuat kebijakan-kebijakan sepihak yang bertujuan mencegah pembentukan negara palestina dan pada akhirnya Israel bisa mempengaruhi hasil negosiasi Palestina termasuk pembentukan Palestina yang berdampingan dengan Israel. Hal ini lah yang membuat semua resolusi yang ada tidak pernah menghasilkan solusi yang menguntungkan Palestina.

Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Sebenarnya, masalah hakiki dari Palestina adalah perampasan tanah Palestina yang didalangi oleh Barat utamanya Inggris kala itu dengan tujuan untuk membentuk Negara yakni Israel yang memusuhi kaum Muslim di jantung

dulunya merupakan bangsa yang satu; dengan bahasa yang satu, agama yang satu, dan harapan yang satu untuk bangkit kembali.

2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Konflik Palestina-

Israel

Sejak Perang Dunia II, pemerintah negeri Paman Sam telah menyumbangkan uang lebih dari 140 milyar dollar kepada Israel (data tahun 2003). Setiap tahunnya Israel menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang setara dengan seperlima dari total bantuan luar negeri AS atau sebesar 500 dolar pertahun kepada setiap warga Israel. Thomas R. Stauffer, dosen Ekonomi Energi dan Timur Tengah di Harvard University, menghitung komponen dana yang telah dikeluarkan AS selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat dukungannya pada Israel, yaitu : 3 Trilyun dollar. Selain itu pada tahun 2007, Deputy Menlu era Presiden Bush Nicholas Burns menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara AS-Israel yang berisi perjanjian bahwa AS akan member bantuan militer sebesar 3 milyar dollar pertahun dalam jangka waktu 10 tahun. Artinya, ada peningkatan bantuan sebesar 25%. Saat penandatanganan perjanjian di kantor Kementrian Luar Negeri Israel, Burns mengatakan,

*“Satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian adalah dengan memperlihatkan kepada Iran dan Syriah bahwa AS akan selalu menjadi faktor utama dalam kestabilan kawasan. Kami akan selalu membela teman kami”.*⁵⁰

Hal ini menunjukkan posisi AS pada konflik kependudukan yang terjadi antara Israel dan Palestina. AS selalu berada di pihak Israel dengan menyetujui semua tindakan Israel terhadap Palestina. AS merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi Demokrasi dan juga Hak Asasi Manusia, namun dalam konflik Palestina-Israel AS melupakan segala tujuan negaranya tersebut demi membela kepentingan Israel.

Sebuah angin segar bagi Palestina ketika terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2008 karena Obama dirasa akan banyak membawa perubahan pada konflik Palestina-Israel karena kedekatannya dengan Negara-negara Muslim. Setahun setelah terpilihnya Obama, tahun 2009 Obama menyampaikan pidatonya di Mesir yang berisi bahwa Presiden Obama berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina dan pidatonya tersebut diulangi pada Sidang Umum PBB tahun 2010 yang akhirnya mendapat pujian dari beberapa Negara.

Namun, pada kenyataannya kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Palestina-Israel masih tetap sama, membela kepentingan Israel. Gideon Levy, kolumnis terkemuka Israel yang anti-kependudukan, menulis dalam artikel di Haaretz dengan judul "Obama's America is not delivering the good". Dalam artikel tersebut, Levy menilai bahwa janji-janji perubahan yang dibawa Obama ternyata tidak dipenuhi. Levy menulis,

"Pidato Cairo telah menyalakan semangat separuh dunia. Menjadikan permukiman sebagai prioritas utama membangkitkan harapan bahwa pada akhirnya, seorang negarawan yang duduk di Gedung Putih memahami bahwa

kejahatan pendudukan adalah permukiman. Dari Kairo, terlihat kemungkinan untuk melucuti permukiman itu. Langit adalah batasnya. Lalu, pemerintahan (Obama) jatuh pada jebakan yang dibuat oleh Israel dan tidak memperlihatkan tanda-tanda perbaikan”,⁵¹

Setelah pidato Obama ternyata tidak membawa perdamaian diantara kedua Negara konflik. Disini Levy jelas sekali menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Obama merupakan sesuatu yang percuma. Pada dasarnya hubungan AS-Israel sudah sangat dekat, bahkan siapapun yang menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat haruslah berhubungan baik dengan Israel.

Amerika Serikat selama ini membangun citra terhadap Israel adalah sebuah Negara Timur Tengah yang dikepung Negara-negara Arab yang memusuhinya. Israel diposisikan sebagai Negara yang terus menerus membela diri dari serangan teroris karena itulah AS berkewajiban untuk membantu Israel. Hal ini bisa dilihat dalam pidato Obama di kota Sderot, Israel. Obama mengatakan :

“Jika seseorang mengirimkan roket kerumah saya, tempat dimana kedua putri saya tidur diwaktu malam, saya akan melakukan hal yang sama. Terkait negosiasi dengan Hamas, sangatlah sulit untuk bernegosiasi dengan sebuah kelompok yang bukan mewakili sebuah bangsa, tidak mengakui hak eksistensi Anda, secara kontinyu menggunakan terror sebagai senjata, dan sangat dipengaruhi oleh Negara-negara lain.”⁵²

Selain itu, kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Palestina-Israel juga bisa dilihat dalam pidato BarrackObama setelah dilantik menjadi Presiden tahun 2009. Obama mengatakan :

⁵¹ ibid

⁵² <http://www.haaretz.com/print-edition/news/obama-tells-un-a-palestinian-state-could-rise-within-a-year-1.315372> diakses tgl 9 November 2012.

"Amerika berkomitmen pada keamanan Israel untuk membela dirinya dihadapan ancaman yang nyata. Selama bertahun-tahun, Hamas telah meluncurkan ribuan roket kepada warga Israel yang tak berdosa. Tidak ada Demokrasi yang bisa menerima bahaya seperti ini bagi rakyatnya, tidak pula komunitas Internasional, dan tidak juga rakyat Palestina sendiri, yang kepentingannya telah terabaikan karena aksi terror. Sebagai pihak yang benar-benar menghendaki perdamaian, Kuartet(AS, Rusia, Uni Eropa, PBB) menegaskan bahwa Hamas harus memenuhi syarat yang jelas ini : akui hak eksistensi Israel, hentikan kekerasan, dan patuhi perjanjian antara Israel-PLO/Otoritas Palestina yang telah dibuat masa lalu."⁵³

Pidato ini membuat para pemimpin Israel yang awalnya waspada menunggu tindak lanjut dari Pidato Obama menjadi sedikit lebih lega dan memastikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari Obama. Para pemimpin Israel kini dengan berani terang-terangan mengeluarkan pernyataan menolak segala usulan penghentian pemukiman dan bahkan menolak berdirinya Negara Palestina. Obama juga mengatakan bahwa landasan politik luar negeri AS terhadap Israel karena adanya "kesamaan kepentingan". Disini terlihat jelas bahwa AS selamanya akan membela kepentingan Israel. AS akan menjamin keamanan Israel dengan mengirimkan bantuan-bantuan militer. AS juga juga menjamin bahwa Israel dapat membela diri dari segala ancaman, dari Gaza hingga Teheran.

Obama juga pernah menyatakan bahwa Palestina hanya akan mengalami kegagalan jika melakukan deligitimasi terhadap Israel. Tindakan simbolis untuk mengisolasi Israel di PBB tidak akan menciptakan sebuah negara merdeka. Palestina tidak akan mencapai perdamaian apabila Hamas masih berada pada jalur terror dan Palestina tidak akan mendapatkan kemerdekaannya dengan

⁵³ <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/> diakses pada 9 November 2012

menyangkal Israel untuk eksis. Disisi lain Obama juga menjelaskan tentang hubungan AS dengan Israel. AS akan tetap berkomitmen untuk keamanan Israel dan AS akan melawan jika ada beberapa pihak yang mengkritik kebijakan ini di forum Internasional.⁵⁴

Obama juga berkomentar terkait konflik Palestina-Israel di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 19 Mei 2011 :

“Untuk masalah keamanan, setiap negara memiliki hak untuk membela diri, dan Israel harus mampu mempertahankan diri terhadap ancaman apapun. Ketentuan ini untuk mencegah kebangkitan terorisme, untuk menghentikan adanya filtrasi senjata, dan untuk memberikan keamanan di daerah perbatasan. Prinsip ini merupakan dasar-dasar negosiasi. Palestina harus tahu garis wilayah mereka, keamanan Israel juga harus tetap terjaga.”⁵⁵

Politik luar negeri AS terhadap konflik Palestina dan Israel cenderung status Quo. Janji-janji yang ditawarkan Gedung Putih hanya isapan belaka. Hal ini membuat upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel berjalan ditempat. Hal ini juga diperkuat dengan sikap AS atas perdamaian konflik ini yang masih sangat berpihak terhadap Israel. AS ingin menciptakan negara Yahudi dikawasan Timur Tengah yang aman yang nantinya hidup berdampingan dengan Palestina. Disamping itu, Keamanan Israel merupakan poin penting dari Politik Luar Negeri AS.⁵⁶

⁵⁴ <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-barack-obama-prepared-delivery-moment-opportunity> diakses pada 21 Desember 2012

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/20/remarks-president-obama-and-prime-minister-netanyahu-israel-after-bilate> diakses pada 21 Desember 2012

Pembuatan kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di pengaruhi oleh beberapa aktor penting seperti yang sudah dijelaskan yaitu Presiden, Kongres, National Security Council (NSC), Departemen Luar Negeri, Central Intelligent Agency (CIA), Departemen Pertahanan, Office of The U.S Trade Representative (USTR), dan Kelompok Kepentingan. Dari beberapa aktor yang ada peran terbesar ada di Kelompok Kepentingan AS. Kelompok Kepentingan akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Kongres dan disetujui Presiden dengan member sponsor kepada para pembuat kebijakan agar kepentingannya tercapai.

Menarik untuk dilihat adalah Kebijakan Politik Luar Negeri AS terhadap konflik yang saat ini masih berlangsung antara Palestina dan Israel. Bagaimana arah kebijakan AS di masa Obama yang terlihat adanya standar ganda. Dimana disatu sisi Obama terlihat mendukung perdamaian dan kesejahteraan Palestina, namun disisi lain Obama tidak pernah lepas dari kepentingan Israel. Tidak bisa dipungkiri kedekatan antara AS dan Israel membuat kebijakan AS selalu membela Israel. Hal ini membuat resolusi yang ada tidak membuahkan hasil apapun.

Berpihaknya AS kepada sekutunya Israel, membuat pihak Palestina yang semula berharap adanya perubahan saat Obama terpilih menjadi Presiden merasa dipermainkan. Otoritas Palestina harus berjuang kembali untuk mendapatkan kedaulatan Palestina seutuhnya dan mengakhiri kependudukan yang dilakukan oleh Israel. Berbagai cara telah ditempuh Palestina, hingga Palestina ingin bergabung dalam PBB dengan status anggota tetap. Untuk itu pada tanggal 21 September 2011 Palestina yang diwakili oleh Presiden Mahmud Abbas mengajukan Palestina menjadi anggota tetap di PBB.